

Bongkar Mafia Anggaran

Pernyataan dan Tuntutan Solmadapar :

- Pansus mandiri, penegak hukum impoten
- Gubernur zinahi DPRD lahirkan mafia anggaran
- Penjarakan mafia anggaran
- Polda, Kejati dan penegak hukum hanya NATO (No Action Talk Only)
- Usut tuntas siluman mafia anggaran
- Bubarkan Pansus, pecat gubernur, penjarakan semua oknum mafia anggaran

Legislator dari Fraksi PDIP marah. Spanduk dan tulisan pendemo yang mengkritisi soal anggaran dianggap tak intelek. Suasana sedikit memanas. Pernyataan sikap Solmadapar patut disikapi.

PONTIANAK. Paripurna pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kalbar terhadap perubahan APBD 2010 dalam paripurna di Balairung Sari DPRD Kalbar, Selasa (4/9) diwarnai aksi demonstrasi. Sejumlah mahasiswa dari Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) menuntut penegak hukum membongkar mafia anggaran di provinsi itu.

■ Halaman 7

Bongkar Mafia

..... dari halaman 1

Aksi para mahasiswa itu mengusulkan temuan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap kerugian keuangan pada Pemrov Kalbar sebesar Rp 156 miliar dan temuan nilai aset yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Bahkan aksi mahasiswa tersebut sempat terjadi keributan antara legislator Kalbar dengan para pendemo yang jumlahnya sekitar sepuluh orang itu.

Keributan itu bermula ketika dua orang anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PDI Perjuangan Martinus Sudarno dan Haritus mendatangi para pendemo untuk mendengarkan pernyataan sikap dan tuntutan mereka. Spanduk yang bertuliskan 'Gubernur Zinahi DPRD' membuat legislator tersebut naik pitam.

Aksi dorong mendorong

antara mahasiswa dengan legislator itu pun tak dapat dihindarkan, bahkan beberapa kali legislator DPRD Kalbar, Martinus Sudarno, ingin mengambil spanduk yang dinilai tulisannya tidak beretika itu. Namun, penjagaan yang ketat dari pihak kepolisian membuat kejadian itu tidak berlangsung lama, keadaan kembali membaik.

Selanjutnya, perwakilan dari mahasiswa itu membacakan isi pernyataan sikap mereka dengan lantang menggunakan pengeras suara. Pembacaan pernyataan sikap yang berjudul Pemrov Cacat Mental Siluman Korup itu tidak berlangsung lama.

Usai pembacaan itu, Martinus Sudarno kembali in-

gin merampas spanduk yang dibawa para pendemo. Namun mendapat perlawanan dari mahasiswa, sesaat kemudian mahasiswa meninggalkan gedung terhormat tersebut.

Isi pernyataan sikap itu juga mengkritisi kinerja BPK RI Perwakilan Kalbar serta aparat penegak hukum. BPK dinilai lamban dalam mengaudit APBD 2010 dan Solmadapar meminta agar BPK secepatnya memublikasikan setiap hasil temuan yang janggal dan berindikasi merugikan keuangan daerah.

Solmadapar juga mengkritisi penggunaan anggaran kedatangan Presiden RI di Kalbar tahun ini. Mereka menuntut transparansi penggunaan anggaran tersebut. Solmadapar juga mendesak DPRD Kalbar melalui

Pansus, pihak kepolisian dan Kejati untuk segera menindaklanjuti temuan dan persoalan yang ada.

Orang nomor satu di Bumi Khatulistiwa itu juga didesak memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan diproses secara hukum terhadap mafia anggaran yang telah terbukti secara hukum melakukan tindakan melawan hukum. Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PDI Perjuangan, Martinus Sudarno menyayangkan tulisan yang tertera di spanduk yang dibawa para mahasiswa itu dalam melakukan aksinya. "Mereka tidak beretika, tidak intelek. Kita mengecam aksi yang tidak beretika itu," tegasnya kepada wartawan. (jul)